

Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau (Studi Program Pembinaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru)

* Adam Pratama Azwari¹, Ranggi Ade Febrian²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : adampratamaazwari@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pengembangan sumber daya pariwisata yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau, dengan fokus pada Program Pembinaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2018). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang wisata halal, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta minimnya promosi yang dilakukan secara luas (Widhati, 2018). Meskipun demikian, program ini telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap konsep wisata halal dan sertifikasi halal pada sektor pariwisata di Pekanbaru. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas program ini, seperti peningkatan sosialisasi, dukungan infrastruktur, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta.

Kata kunci: Evaluasi Program, Wisata Halal, Pengembangan Pariwisata, Kota Pekanbaru

Abstract

This study aims to evaluate the tourism resource development program run by the Riau Provincial Tourism Office, focusing on the Halal Tourism Development Program in Pekanbaru City. The research method used is a qualitative approach with a descriptive method (Sugiyono, 2018). Data were collected through interviews, observations, and documentation with various related parties, including local governments and halal tourism business actors. The results of the study indicate that the implementation of this program still faces various challenges, including a lack of public understanding of halal tourism, limited supporting infrastructure, and minimal promotion carried out widely (Widhati, 2018). However, this program has had a positive impact on increasing business actors' awareness of the concept of halal tourism and halal certification in the tourism sector in Pekanbaru. Therefore, a more comprehensive strategy is needed to increase the effectiveness of this program, such as increasing socialization, infrastructure support, and stronger collaboration between the government and the private sector.

Keywords: Program Evaluation, Halal Tourism, Tourism Development, Pekanbaru City

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Inskeep, 1994). Dalam konteks Provinsi Riau, pariwisata berkembang pesat dengan berbagai daya tarik wisata budaya, alam, dan buatan. Salah satu bentuk pengembangan yang tengah dikembangkan adalah wisata halal, yang menargetkan wisatawan Muslim dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejalan dengan visi Provinsi Riau untuk menjadi destinasi wisata unggulan, Dinas Pariwisata Provinsi Riau menginisiasi Program Pembinaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru sebagai salah satu strategi utama dalam pengembangan sektor ini (Subarkah, 2018).

Meskipun program ini memiliki potensi yang besar, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap konsep wisata halal, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta belum optimalnya strategi pemasaran menjadi kendala utama dalam pengembangan program ini. Selain itu, kebijakan terkait wisata halal di daerah ini belum sepenuhnya diselaraskan dengan kebutuhan dan ekspektasi wisatawan Muslim domestik maupun internasional. Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengevaluasi efektivitas Program Pembinaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru dengan menelaah berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, termasuk kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat terhadap konsep wisata halal.

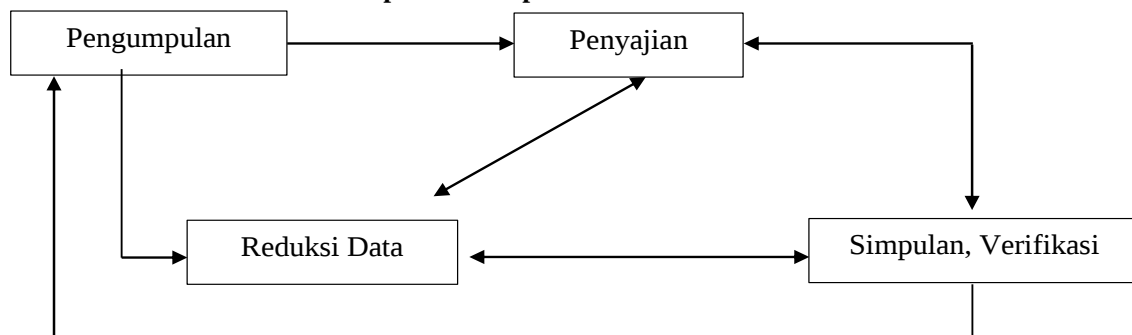
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Program Pembinaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru (Sugiyono, 2018). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat Dinas Pariwisata, pelaku usaha wisata halal, serta wisatawan. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk melihat kondisi nyata infrastruktur wisata halal serta efektivitas program pembinaan yang telah dilakukan. Dokumentasi dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan kebijakan dan data statistik kunjungan wisatawan, turut digunakan untuk mendukung analisis penelitian.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Dunn, 2003). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Bagan Metode Penelitian :

Gambar 1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



Sumber : Sugiyono, 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan sektor yang saat ini berkembang dan bahkan menjadi salah satu fenomena global. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata melibatkan berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan sebagainya serta melibatkan semakin banyak orang dan masyarakat. United Nations World Tourism Organization (2016) dalam Understanding basic Glossary of Tourism bahkan menyatakan bahwa pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya, dan ekonomi. Dari pernyataan UNWTO tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata terdiri dari berbagai sektor lain yang saling mendukung. Melihat perkembangan sektor pariwisata dari waktu ke waktu, pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu industri terbesar di dunia menurut Tovmasyan (2016). Ini didukung oleh catatan UNWTO (2020) yang mengemukakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.5 miliar kunjungan wisatawan internasional di seluruh dunia dengan total kenaikan sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Contoh penulisan tabel :

Di berbagai sektor pembangunan, pengaruh global membawa perubahan paradigma dan tren global di sektor pembangunan termasuk di bidang pariwisata. Perubahan tersebut mempengaruhi motivasi wisatawan bukan lagi tentang pada hiburan dan kesenangan, tetapi cenderung pada kepuasan memperoleh pengalaman dan pengetahuan unik dan otentik dari daya tarik sumber daya alam dan khususnya budaya yang ada di suatu destinasi menurut Roby (2020)

Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya terbatas pada sektor rill saja, tetapi lebih jauh dari itu, di era keterbukaan informasi saat ini, merupakan suatu keharusan bagi pembangunan di dunia maya. Kunjungan Wisatawan ke luar jawa suatu hal yang mengkhawatirkan karena dapat di artikan bahwa situs lain yang memiliki potensi wisata alam dengan menawarkan pesona yang masih cenderung realistis tidak menunjukkan angka wisatawan.

Tabel.1.

Jumlah Data Pengunjung Wisman di Provinsi Riau pada Maret 2023- Maret 2024

PINTU MASUK	Jumlah Kunjungan			Perubahan (%)	
	Maret 2023	Februari 2024	Maret 2024	Maret'24 thd Februari'24	Maret'24 thd Maret'23
I. Pintu Masuk Imigrasi (Utama)	3.474	6.591	.629	-44,94	4,46
A. Angkutan Udara	1.701	3.706	.081	-43,85	22,34
1. Bandara SSK II	1.701	3.706	.081	-43,85	22,34
B. Angkutan Laut	1.773	2.885	.548	-46,34	-12,69
2. Pelabuhan Dumai	1.367	1497	550	-56,58	-52,45
3. Pelabuhan Bengkalis	380	947	590	-37,70	55,26
4. Pelabuhan Meranti	26	441	308	-30,16	1.084,62
II. Pintu Masuk Non Imigrasi (MPD)	32,998	33.252	5.612	7,10	7,92
A. Perbatasan Laut	32.998	33.352	5.612	7,10	7,92

PINTU MASUK	Jumlah Kunjungan			Perubahan (%)	
	Maret 2023	Februari 2024	Maret 2024	Maret'24 thd Februari'24	Maret'24 thd Maret'23
TOTAL (I+II)	36,472	39,843	9.24	-1,51	7,59

1

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2024

Berdasarkan table 1.di atas, jumlah kunjungan wisman yang masuk melalui pintu masuk utama imigrasi mengalami penurunan sebesar 44,94 persen jika dibandingkan Februari 2024, sebaliknya jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,46 persen. Kenaikan terjadi hampir semua pintu masuk imigrasi kecuali Pelabuhan Dumai jika dibandingkan dengan Maret 2023. Sementara itu, jumlah kunjungan wisman yang masuk melalui pintu masuk non imigrasi yang tercatat melalui MPD mengalami kenaikan sebesar 7,10 persen dibandingkan Februari 2024. Demikian juga dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,92 persen. Disini dapat melihat bahwa wisata di Riau mempunyai potensi yang sangat kuat untuk menarik wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang ada di Riau. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Riau di harapkan mempunyai strategi-strategi yang mendukung dan di terapkan untuk menarik perhatian lebih wisatawan dalam negara maupun wisawatan luara negeri. (BPS Riau;2024)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Subarsono (2009:199) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan berupa : Input; Proses ; Output Outcome

1. Masukan (Input)

Input yang pada dasarnya digunakan sebagai masukan agar sistem berfungsi. Evaluasi pada tahap awal program bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang akan dilaksanakan sesuai dengan masalah yang ditemukan dalam hal ini meliputi sumber daya, dana, tenaga, sarana dan prasarana yang ada. Menurut penelitian yang dilakukan di Pekanbaru, nilai input telah berdampak pada pelaksanaan program dan target capaian program. Nilai input yang didapatkan kurang sehingga membuat capaian proses dan output tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

a) Anggaran

Anggaran merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan program pembinaan wisata halal di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Riau (20 Januari 2025),

Dari hasil wawancara ini, dapat dianalisis bahwa meskipun terdapat alokasi anggaran dari APBD, tetapi masih terdapat kendala dalam memenuhi kebutuhan seluruh pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal. Keterbatasan dana ini menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan wisata halal di Pekanbaru, karena tidak semua UMKM mendapatkan akses yang sama terhadap program ini.

Sementara kendala ini juga ditekankan oleh Ir. Khafzan, Direktur LPPOM MUI Provinsi Riau (20 Januari 2025), yang mana dapat ditarik bahwa pemerintah telah

menyediakan anggaran untuk sertifikasi halal, kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkannya.

Program pembinaan wisata halal belum memiliki dukungan anggaran yang optimal untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah memang telah mengalokasikan dana, tetapi masih belum mencakup seluruh kebutuhan, terutama dalam pembiayaan sertifikasi halal dan pengembangan bisnis.

b) Kegiatan dan Pelaksanaan

Kegiatan untuk menunjukkan upaya mengubah suatu input dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program. Proses diperlukan untuk mengubah masukan menjadi hasil (keluaran) yang direncanakan. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sesuai dengan rencana awal. Untuk melihat Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Pada Dinas Provinsi Riau (Studi Pembinaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru) dilihat dari indikator Inpu dapat dinilai

Dalam aspek kegiatan, Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung wisata halal, salah satunya dengan melaksanakan pelatihan dan promosi. Namun, efektivitas dari kegiatan ini masih perlu ditingkatkan dalam wawancara Bersama Sri Wahyuni, S.E., Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. (20 Januari 2025)

Namun, kegiatan ini masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha yang membutuhkan bimbingan dan fasilitasi. Banyak pelaku UMKM yang merasa belum mendapatkan informasi yang cukup terkait mekanisme sertifikasi halal dan manfaatnya yang telah disampaikan Direktur LPPOM MUI Provinsi Riau, Ir. Khafzan (20 Januari 2025).

Analisis dari wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan pelatihan dan promosi telah dilakukan, namun penyebaran informasi dan pemahaman tentang wisata halal masih belum merata. Banyak UMKM yang belum memiliki akses terhadap kegiatan ini, sehingga program wisata halal belum berjalan secara optimal.

Dari wawancara ini dapat dianalisis bahwa salah satu kendala dalam implementasi wisata halal adalah keterbatasan tenaga pendamping. Pelaku usaha membutuhkan bimbingan yang lebih intensif untuk memahami standar halal, tetapi jumlah fasilitator yang tersedia masih belum memadai.

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam mendukung wisata halal juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dari wawancara, terlihat bahwa masih banyak kekurangan dalam infrastruktur wisata halal di Pekanbaru. Pemerintah perlu lebih serius dalam menyediakan fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan halal, seperti restoran bersertifikasi halal, hotel ramah muslim, serta tempat ibadah yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi wisata halal di Provinsi Riau. Pertama, kurangnya penyebaran informasi mengenai wisata halal masih menjadi hambatan utama. Meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan, belum semua pelaku usaha, terutama UMKM, memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai wisata halal. Masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman serta implementasi standar halal di sektor pariwisata.

Kedua, keterbatasan tenaga pendamping menjadi kendala utama dalam implementasi wisata halal. Para pelaku usaha membutuhkan bimbingan yang lebih intensif

untuk memahami dan menerapkan standar halal, namun jumlah tenaga yang tersedia masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh pelaku usaha. Hal ini menyebabkan proses sertifikasi halal dan penerapan standar halal berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

Ketiga, efektivitas program yang telah dilakukan masih perlu ditingkatkan. Pelatihan dan promosi yang telah dilakukan sejauh ini masih perlu dievaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Strategi yang lebih komprehensif diperlukan agar informasi terkait wisata halal dapat tersampaikan secara lebih luas dan menyeluruh. Pendekatan yang lebih langsung kepada pelaku usaha dan pemanfaatan media digital dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas jangkauan informasi dan pendampingan.

Keempat, sarana dan prasarana yang mendukung wisata halal masih belum optimal. Minimnya restoran dan hotel bersertifikasi halal, serta kurangnya pusat informasi wisata halal bagi wisatawan muslim, menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan wisata halal di Pekanbaru. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk memastikan infrastruktur yang memadai agar wisata halal dapat berkembang secara optimal.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun program wisata halal telah mendapatkan dukungan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan promosi, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Diperlukan strategi tambahan untuk memastikan bahwa informasi mengenai wisata halal dapat tersampaikan secara lebih luas dan menyeluruh, serta peningkatan jumlah tenaga pendamping yang dapat memberikan bimbingan kepada para pelaku usaha. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang memadai seperti hotel, restoran, dan pusat informasi halal juga menjadi aspek penting dalam pengembangan wisata halal di Provinsi Riau. Dengan demikian, diharapkan program wisata halal di Provinsi Riau dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih besar bagi sektor pariwisata di daerah tersebut.

2. Process (Proses)

a. Komunikasi dan Pelaksanaan

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa meskipun pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi, masih ada kendala dalam efektivitas komunikasi. Banyak pelaku usaha yang belum memahami secara menyeluruh prosedur yang harus mereka lalui untuk mendapatkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan metode komunikasi yang lebih interaktif, seperti pelatihan langsung dan layanan konsultasi berbasis digital yang dapat memberikan pendampingan yang lebih baik.

b. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program wisata halal, sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program wisata halal adalah kurangnya tenaga pendamping yang memadai. Jika jumlah fasilitator tidak ditingkatkan, maka efektivitas program ini akan berkurang karena tidak semua UMKM mendapatkan pendampingan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya manusia yang khusus ditugaskan untuk membimbing pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.

c. Sikap Pelaksana

Sikap dari para pelaksana program juga mempengaruhi keberhasilan implementasi wisata halal di Pekanbaru. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa meskipun ada komitmen dari pemerintah dan LPPOM MUI, masih ada tantangan dalam hal sikap pelaksana, terutama dalam memberikan pelayanan yang transparan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan profesionalisme para petugas dengan memberikan pelatihan khusus dalam pelayanan publik agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih lancar.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang kompleks sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program wisata halal. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa meskipun ada upaya penyederhanaan birokrasi, proses sertifikasi halal masih dianggap kompleks oleh banyak pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali sistem administrasi yang ada dan mencari solusi yang lebih praktis agar program ini dapat berjalan dengan lebih efektif.

Evaluasi indikator proses menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan peningkatan dalam efektivitas komunikasi, penambahan tenaga pendamping, peningkatan pelayanan, serta penyederhanaan birokrasi agar wisata halal di Pekanbaru dapat berkembang lebih optimal.

3. Output (Hasil)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya hasil kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu hasil kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi UMKM banyak.

a. Hasil Kegiatan

Hasil dari program pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru telah menunjukkan dampak yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Program wisata halal telah berhasil meningkatkan jumlah usaha yang tersertifikasi halal, sekaligus mendorong pertumbuhan wisatawan muslim di Pekanbaru. Namun, meskipun ada peningkatan, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pelaku usaha mendapatkan akses mudah terhadap program ini.

Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan dalam aspek sertifikasi halal, pengembangan SDM, serta peningkatan kepercayaan konsumen. Namun, masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas sertifikasi dan dukungan pemasaran. Untuk memperkuat program ini, diperlukan peningkatan dalam fasilitasi sertifikasi halal dan strategi promosi yang lebih efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan halal ke Pekanbaru.

b. Pertanggung Jawaban (LPJ)

Berdasarkan analisis terhadap Hasil Kegiatan dan Pertanggungjawaban LPJ, dapat disimpulkan bahwa program wisata halal di Kota Pekanbaru telah menunjukkan dampak positif dalam aspek sertifikasi halal, pengembangan SDM, serta peningkatan

kesadaran masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas sertifikasi, strategi pemasaran, serta transparansi evaluasi program. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperluas cakupan program, mempercepat proses sertifikasi halal, serta meningkatkan sinergi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru.

3. Output (Hasil)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya hasil kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu hasil kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi UMKM banyak.

a. Hasil Kegiatan

Hasil dari program pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru telah menunjukkan dampak yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan dalam aspek sertifikasi halal, pengembangan SDM, serta peningkatan kepercayaan konsumen. Namun, masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas sertifikasi dan dukungan pemasaran. Untuk memperkuat program ini, diperlukan peningkatan dalam fasilitasi sertifikasi halal dan strategi promosi yang lebih efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan halal ke Pekanbaru.

b. Pertanggung Jawaban (LPJ)

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan bagian penting dalam evaluasi program wisata halal, yang memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sistem pertanggungjawaban dalam program wisata halal sudah cukup jelas, dengan adanya pelaporan berkala dari dinas terkait dan LPPOM MUI. Namun, agar program ini lebih transparan dan efektif, diperlukan publikasi yang lebih luas mengenai hasil evaluasi program, serta mekanisme umpan balik dari pelaku usaha dan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap Hasil Kegiatan dan Pertanggungjawaban LPJ, dapat disimpulkan bahwa program wisata halal di Kota Pekanbaru telah menunjukkan dampak positif dalam aspek sertifikasi halal, pengembangan SDM, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas sertifikasi, strategi pemasaran, serta transparansi evaluasi program. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperluas cakupan program, mempercepat proses sertifikasi halal, serta meningkatkan sinergi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru.

4. Outcome (Pendapatan)

a. Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam implementasi program wisata halal di Kota Pekanbaru. Meskipun program ini sudah berjalan, dampaknya terhadap PAD masih belum sepenuhnya optimal. Dari wawancara, terlihat bahwa program wisata halal telah berkontribusi dalam meningkatkan transaksi

ekonomi di sektor UMKM. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi agar dampaknya lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan sektor ini, seperti: (1) Meningkatkan promosi wisata halal melalui platform digital dan e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. (2) Menyediakan insentif dan pendampingan bagi pelaku usaha halal agar mereka lebih siap dan kompetitif dalam industri pariwisata halal. (3) Mengembangkan ekosistem wisata halal yang lebih inklusif dengan melibatkan sektor pendukung seperti transportasi dan perhotelan. (4) Mempermudah akses pasar bagi UMKM halal dengan program digitalisasi dan dukungan pemasaran terpadu.

Dengan strategi yang lebih terarah dan dukungan yang kuat dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya, wisata halal dapat berkembang menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru.

b. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap wisata halal juga menjadi indikator penting dalam evaluasi program ini. Dengan adanya program wisata halal, masyarakat cenderung lebih percaya pada sektor pariwisata karena adanya standar halal yang diterapkan di berbagai tempat usaha.

Kepercayaan masyarakat terhadap wisata halal telah meningkat seiring dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal. Namun, masih ada tantangan dalam memperluas cakupan program ini agar semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya wisata halal. Oleh karena itu, pemerintah perlu: (1) Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat wisata halal. (2) Mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal guna meningkatkan kepercayaan pelanggan. (3) Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap standar halal di sektor wisata agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

SIMPULAN

Program pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran, penyediaan kebijakan, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti LPPOM MUI untuk mendorong sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang bergerak di sektor kuliner dan jasa wisata. Namun, meskipun terdapat anggaran yang dialokasikan, besarnya dana yang tersedia masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh pelaku usaha yang membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk sertifikasi halal maupun pelatihan terkait pengelolaan bisnis halal.

Pelaksanaan program wisata halal di Pekanbaru telah dilakukan melalui berbagai pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha, dengan melibatkan Dinas Pariwisata, LPPOM MUI, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengembangan sektor wisata halal. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai pelatihan guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai standar halal dan proses sertifikasi halal. Namun, jangkauan dari program pelatihan ini masih terbatas, sehingga belum semua pelaku usaha dapat terlibat dan mendapatkan manfaatnya.

Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, program wisata halal di Pekanbaru telah mulai menunjukkan hasil yang positif, salah satunya dengan meningkatnya jumlah UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal. Direktur LPPOM MUI Provinsi Riau menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelaku usaha

yang mengajukan sertifikasi halal mengalami peningkatan, meskipun jumlahnya masih jauh dari potensi maksimal yang bisa dicapai. Sertifikasi halal ini berdampak positif terhadap kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM local.

Dampak dari program wisata halal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sudah mulai terlihat, tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyampaikan bahwa meskipun wisata halal telah meningkatkan transaksi ekonomi di sektor UMKM, kontribusinya terhadap PAD masih belum sebesar yang diharapkan karena jumlah usaha yang berkontribusi dalam wisata halal masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. 2024. Perkembangan Pariwisata Provinsi Riau Maret 2024. Berita Resmi Statistik No. 21/05/14/Th.XXV,2 Mei 2024. Di akses pada tanggal 7 Juni 2024 <https://riau.bps.go.id/pressrelease/2024/05/02/997/perkembangan-pariwisata-provinsi-riau-maret-2024.html>
- Dunn, William, N, 2003. Analisis Kebijakan Public. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Roby Ardiwidjaja. 2020. Pariwisata Budaya; Pelestarian Budaya Sebagai Daya Tarik Ke-Indonesian. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Subarkah, A.R. 2018. Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). Sosial Politik, 4(2), 29-72
- Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet
- Tovmasyan, G. 2016. Tourism Development Trends in The World. European Journal of Economic Studies, Vol. 17 (3). hal 429-434
- United Nations World Tourism Organization. 2016. Glossary of Tourism Terms. Di akses pada tanggal 7 Juni 2024 <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>.
- United Nations World Tourism Organization. 2020. Glossary of Tourism Terms. Di akses pada tanggal 7 Juni 2024 <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>.